BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor primer yang dapat membantu pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertanian adalah sektor utama penyumbang perekonomian karena sebagian besar perekonomian Indonesia berasal dari hasil pertanian. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang memiliki peranan strategis untuk pembangunan perekonomian nasional. Hal tersebut di dasari atas peranan penting yang dimiliki sektor ini, yaitu potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, besarnya pangsa pasar ekspor, serta besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Pertanian dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pertanian rakyat dan pertanian besar. Pertanian rakyat masih dikelola oleh rakyat secara tradisional dengan modal yang tidak cukup besar dengan area atau luas lahan yang sempit serta tanaman yang di budidayakan sedikit. Sedangkan pertanian besar yaitu pengelolaan yang dikelola oleh badan usaha atau perusahaan dengan mempekerjakan para petani. Pertanian besar ini memiliki modal besar, lahan yang luas, serta hasil pertanian untuk konsumsi masyarakat dan sebagian untuk komoditas ekpor agar mendapatkan keuntungan. Pertanian tidak hanya areal persawahan saja tetapi di dalamnya terdapat perkebunan.

Pertanian dapat menghasilkan devisa bagi perekonomian jika lebih dikembangkan. Selain itu, sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi di dapatkan dari sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sehingga dapat menampung luapan tenaga kerja Indonesia yang berlimpah yang kemudian akan mengurangi angka pengangguran.

Grafik 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

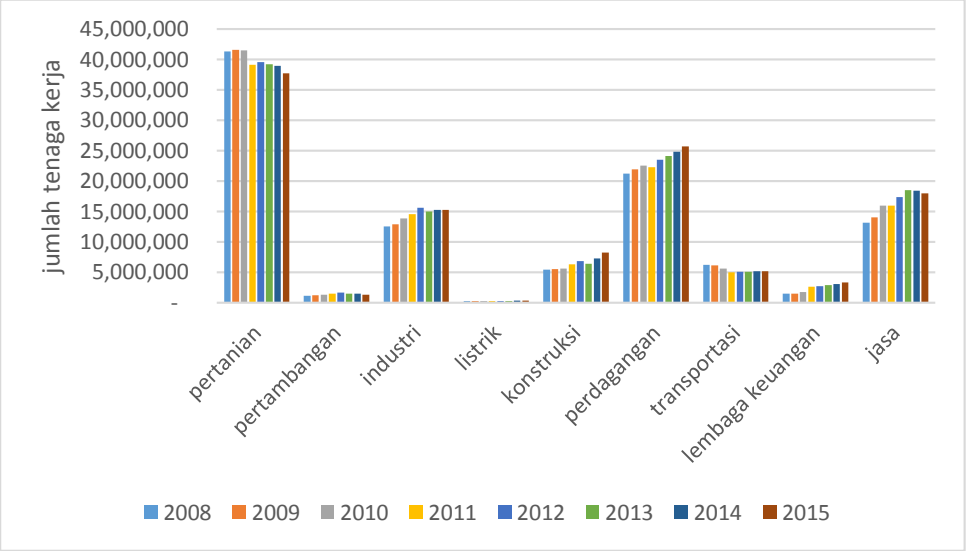

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Berdasarkan grafik 1.1 di atas terlihat bahwa tenaga kerja di beberapa sektor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada grafik di atas, sektor pertanian menduduki posisi pertama dengan jumlah tenaga kerja terbanyak, selanjutnya sektor perdagangan pada urutan ke dua, jasa pada urutan ke tiga, industri pada urutan ke empat, konstruksi pada urutan ke lima, transportasi pada urutan ke enam, lembaga keuangan pada urutan ke tujuh, pertambangan pada urutan ke delapan dan posisi terakhir yaitu sektor listrik. Dari grafik di atas dapat disimpilkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian memiliki jumlah tenaga

kerja terbanyak dibandingkan sektor lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia di dominasi oleh sektor pertanian.

Sektor pertanian dianggap sebagai sektor utama penghasil dalam kontribusinya yang sangat besar sebagai penyumbang perekonomian. Sektor pertanian yang merupakan sektor primer seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dengan baik, karena sektor ini memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah terjadinya transformasi sektor ekonomi, tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian kian tertinggal dan cenderung menurun. Berikut penyerapan tenaga kerja sektor pertanian:

Tabel 1. 1 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Tenaga Kerja Sektor Pertanian (juta jiwa)	Perkembangan Tenaga Kerja (dalam persen)
2008	42.010.671	0,24 %
2009	42.320.667	0,73 %
2010	42.160.374	-0,37 %
2011	40.772.362	-3,3 %
2012	40.627.815	-0,35 %
2013	39.992.491	-1,56 %
2014	39.903.043	-0,22 %
2015	38.935.522	-2,42 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2015 tenaga kerja pada sektor pertanian menurun. Pada tahun 2008-2009 jumlah tenaga kerja meningkat dari 0,24% menjadi 0,73%, namun pada tahun selanjutnya jumlah tenaga kerja menurun dari -0,37% ke -3,3%. Angka perubahan sebesar -3,3% yang terjadi pada tahun 2011 merupakan puncak menurunnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian tertinggi. Penurunan jumlah tenaga kerja terus

terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Dapat terlihat pada tahun 2015 tenaga kerja terus menurun hingga sebesar -2,42%. Menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian disebabkan karena sebagian tenaga kerja mulai beralih bekerja di sektor non pertanian. Dengan menurunnya jumlah tenaga kerja artinya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian rendah.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menjadi salah satu peran penting bagi pembangunan nasional. Namun sasaran pembangunan nasional ini belum menunjukkan hasil yang maksimal tetapi cenderung memperihatinkan. Kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang kian memprihatinkan, salah satunya ditandai oleh minimnya lahan pertanian.

Dewasa ini, terdapat banyaknya alih fungsi lahan pertanian baik untuk industri maupun dijadikan area pemukiman sehingga membuat minimnya jumlah lahan pertanian. Luas lahan pertanian di Indonesia saat ini sekitar 13 juta hektare dengan rata-rata lahan yang dimiliki oleh para petani sekitar 0,3 sampai 0,4 hektare[1]. Jika dibandingkan dengan Negara lain, Indonesia masih memiliki luas lahan pangan yang tergolong sempit. Amerika memiliki luas lahan mencapai 450 juta hektare, India 170 juta hektare, dan Nigeria 72 juta hektare[2]. Kondisi tersebut membuat petani Indonesia sulit untuk megembangkan sektor pertanian. Minimnya lahan pertanian ini berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja.

---

[1] Afriza Hanifa, *Kritis, Jumlah Lahan Pertanian di Indonesia*, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/05/26/m4mavr-kritis-jumlah-lahan-pertanian-di-Indonesia (diakses pada Rabu, 11 Januari 14.50 WIB)

[2] Debbie Sutrisno, *Lahan Pangan Indonesia Masih Sempit*, http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/11/29/ohe3cc19-lahan-pangan-Indonesia-masih-sempit (diakses pada Rabu, 11 Januari 15.00 WIB)

Pertanian dianggap tidak dapat menopang kehidupan khususnya bagi generasi muda. Banyak kaum muda khususnya kaum muda di pedesaan lebih memilih untuk merantau dan bekerja selain bertani. Berkurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian juga disebabkan karena banyak masyarakat yang menilai kesejahteraan petani yang masih rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain (1) pertumbuhan ekonomi (2) tingkat upah (3) investasi (4) pengeluaran pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama pembangunan yang dapat dilihat melalui PDB, setiap Negara akan selalu berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga sangat berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya adalah menjaga penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian itu sendiri.

Faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah tingkat upah. Upah merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja. Upah dianggap sangat penting oleh para pekerja, karena dengan adanya upah, maka para pekerja akan semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Namun semenjak adanya kebijakan upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah mendorong sebagian tenaga kerja untuk bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan dengan

upah yang lebih baik dan menyebabkan upah yang di terima petani rendah dibandingkan sektor lain. Model Todaro menjelaskan bahwa sebagian tenaga kerja cenderung mempertimbangkan serta membandingkan berbagai pasar tenaga kerja lalu memilih salah satu diantaranya yang dapat memaksimumkan keuntungan yang mereka harapkan[3]. Namun apabila sebagian tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian lain selain bertani, hanya dapat menikmati dampak dari kebijakan tersebut yaitu berupa upah yang minim yang diberi pemberi kerja yang kemudian akan berdampak ke kesejahteraan petani.

Upah merupakan hal yang paling sensitif apabila dikaitkan dengan pekerja. Upah pekerja di pertanian cenderung meningkat setiap tahunnya. Apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, upah yang tinggi cenderung akan mengurangi jumlah pekerja yang bekerja pada sektor pertanian, dikarenakan para pemberi kerja akan mengurangi jumlah pekerja yang digunakan untuk memperoleh laba maksimum.

Faktor ketiga adalah investasi, investasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Investasi swasta terdiri dari investasi dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diukur oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dilaksanakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal, akan membantu pemerintah untuk mendanai kebutuhan sektor pertanian serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

---

[3] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 406

Data kementerian pertanian menunjukkan bahwa investasi asing di sektor pertanian, selain proporsinya paling rendah, juga mengalami penurunan pada tahun 2005 sampai 2009 dari 3,9 persen menjadi 1,2 persen[4]. Berikut data investasi PMDN dan PMA sektor pertanian:

Tabel 1. 2 Investasi PMDN Sektor Pertanian

Tahun	PMDN	
	Proyek	Nilai Rp Milliar
2010	225	8.883,8
2011	317	9.614,5
2012	211	9.728,9
2013	326	6.949,2
2014	360	13.357,89
2015	441	12.366,38

Sumber: BKPM, diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah investasi PMDN berfluktuasi. Perkembangan PMDN pada tahun 2010 sebesar 8.883,8 miliar rupiah dengan 225 proyek, pada tahun 2011 meningkat menjadi 9.614,5 miliar rupiah dengan 317 proyek, pada tahun 2012 sebesar 9.728,9 miliar rupiah namun jumlah proyek berkurang menjadi 211 proyek. Pada tahun 2013 nilai PMDN menurun menjadi 6.949,2 miliar rupiah akan tetapi jumlah proyek meningkat menjadi 326 proyek, kemudian pada tahun 2014 nilai PMDN mengalami peningkatan tajam menjadi sebesar 13.357,89 miliar rupiah tetapi jumlah proyek menurun menjadi 263 proyek. Sedangkan pada tahun 2015, investasi mengalami penurunan sebesar 12.366,38 miliar rupiah dengan 441 proyek.

[4] Imam Prihadiyoko, Investasi Pertanian Tak Pernah Diurus Serius, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/13/20045422/Investasi.Pertanian.Tak.Pernah.Diurus.Serius (diakses pada Kamis, 20 Juli 2017 pukul 22.50 WIB)

Tabel 1. 3 Investasi PMA Sektor Pertanian

Tahun	PMA	
	Proyek	**Nilai US$ Juta**
2010	170	776
2011	278	1.243,6
2012	275	1.621,7
2013	539	1.616,6
2014	625	2.237,5
2015	704	2.147,1

Sumber: BKPM, diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah investasi PMA berfluktuasi. Perkembangan PMA pada tahun 2010 terjadi investasi PMA sebesar 776 juta dollar dengan 170 proyek, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.243,6 juta dollar dengan 278 proyek, pada tahun 2012 sebesar 1.621,7 juta dollar dengan jumlah proyek menurun menjadi 275 proyek. Kemudian tahun 2013 nilai PMDN menurun tipis menjadi 1.616,6 juta dollar akan tetapi jumlah proyek meningkat tajam menjadi 539 proyek, sedangkan pada tahun 2014 nilai PMA mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.237,5 juta dollar dengan 625 proyek. Namun pada tahun 2015 nilai PMA menurun menjadi 2.147,1 juta dollar dengan proyek yang bertambah menjadi 704 proyek.

Tabel 1.3 dan 1.4 di atas menggambarkan kondisi iklim investasi yang berfluktuasi setiap tahunnya namun cenderung menurun di tahun 2014 dan 2015. Melambatnya pertumbuhan jumlah investasi baik PMDN maupun PMA disebabkan karena para investor kurang tertarik berinvestasi pada sektor pertanian. Rendahnya jumlah investasi tersebut juga bisa disebabkan kurangnya promosi untuk sektor pertanian.

Faktor keempat adalah pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, khususnya untuk sektor pertanian agar output yang dihasilkan petani meningkat. Upaya untuk meningkatkan output dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, untuk itu dibutuhkan tenaga kerja baru untuk menghasilkan ouput pertanian.

Pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa modal untuk penyediaan sarana pertanian. Menurut UU RI No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 dan 82 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani sarana produksi tersebut terdiri atas benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan serta alat dan mesin yang disediakan dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar[5]. Nilai realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1. 4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (miliar)	Perkembangan pengeluaran pemerintah (dalam persen)
2010	8.016,1	4%
2011	15.986	99%
2012	18.247,1	14%
2013	15.931,3	-13%
2014	13.204,4	-17%
2015	15.879,3	20%

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.5 tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2010-2015 pengeluaran pemerintah sangat berfluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 4%.

[5] UU RI No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani

Kemudian tahun 2011 terjadi peningkatan tajam sebesar 99%. Kemudian pengeluaran pemerintah berkembang melambat sebesar 14% pada tahun 2012. Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah mulai mengecil pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah hanya menurun sebesar -13%. Lalu pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah menurun sebesar -17%. Namun pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pertanian tiap tahunnya tumbuh namun cenderung melambat.

Memanfaatkan potensi sektor pertanian dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang tersedia pada sektor pertanian di Indonesia dapat memaksimalkan output pada sektor pertanian. Dan dengan pemerintah menyediakan lahan pertanian yang cukup untuk mengoptimalkan sektor pertanian. Serta dibutuhkannya tambahan investasi. Sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat terealisasikan dengan baik melalui sektor pertanian.

Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi penyerpan tenaga kerja tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Pengaruh Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian
2. Rendahnya jumlah lahan pertanian
3. Rendahnya kesejahteraan petani
4. Rendahnya tingkat upah buruh tani
5. Rendahnya tingkat investasi untuk sektor pertanian
6. Rendahnya perhatian pemerintah untuk sektor pertanian

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang memiliki banyak aspek , dimensi, serta faktor-faktor yang sangat luas dan kompleks, maka peneliti membatasi masalah hanya pada "Pengaruh Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia".

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Upah Buruh Tani terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Investasi untuk Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara upah, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi serta khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk referensi penelitian selanjutnya tentang Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia.